

BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1 Sejarah Perusahaan

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) adalah Kementerian Indonesia yang bertanggung jawab di bidang teknologi Informasi dan komunikasi (Kominfo e. , n.d.). Kementerian Kominfo memiliki Sejarah yang Panjang, sejak dari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Berikut merupakan sejarah Kementerian Komunikasi dan Informatika:



Gambar 2.1 Sejarah Kominfo

(Sumber: Kominfo.go.id)

1. Departemen Penerangan (1945 – 1999)

Pada awal kemerdekaan didirikan Departemen Penerangan dengan tugas melaksanakan kebijakan, model, dan petunjuk di bidang informasi. Selanjutnya pada tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan Departemen Penerangan dan sebagai gantinya Beliau mendirikan Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN).

2. Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (2001 – 2005)
Pada tahun 2000 Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN) telah diubah menjadi Lembaga Informasi Nasional (LIN). Setelah LIN didirikan, tidak lama kemudian diubah menjadi Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (Kemeneg Kominfo). Saat itu, tugas layanan informasi publik diserahkan kepada Menteri Komunikasi dan Informasi.
3. Departemen Komunikasi dan Informatika (2005 – 2009)
Pada tahun 2005, berdasarkan keputusan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005, Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi, Lembaga Informasi Nasional dan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi digabung. Sehingga sebagai pengganti Departemen Komunikasi dan Informatika maka terbentuklah Kementerian Komunikasi dan Informatika.
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika (2009 – Sekarang)
Perubahan nama terus berkembang hingga saat ini. Di penghujung tahun 2010, Kementerian Komunikasi dan Informatika memperkenalkan struktur organisasi yang komprehensif untuk menjadikan informasi sebagai kebutuhan sehari-hari masyarakat. Fungsi informasi tidak hanya fokus pada “penerangan” tetapi bertujuan untuk mendukung komunikasi yang lebih strategis, menambah nilai ekonomi, dan membangun integrasi nasional yang lebih kuat.

Di bawah kepemimpinan Budi Arie Setiadi, terhitung mulai pada tanggal 17 Juli 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika membidangi pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan Informatika, membidangi aplikasi TI, hubungan Masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi/TI.

Pentingnya peran Kominfo terlihat dalam berbagai aspek, seperti digitalisasi penyiaran televisi, regulasi terkait internet, penanganan pengaduan konten termasuk rumor palsu, Internet 5G, dan dukungan

terhadap startup di Indonesia. Serta mendukungnya kemajuan di bidang komunikasi dan IT.

Sejarah Kementerian Komunikasi dan Informatika mencerminkan perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia. Agar Indonesia mampu bersaing dengan negara lainnya maka Kominfo selalu berupaya untuk mengembangkan teknologi dan informasi.

2.1.2 Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika

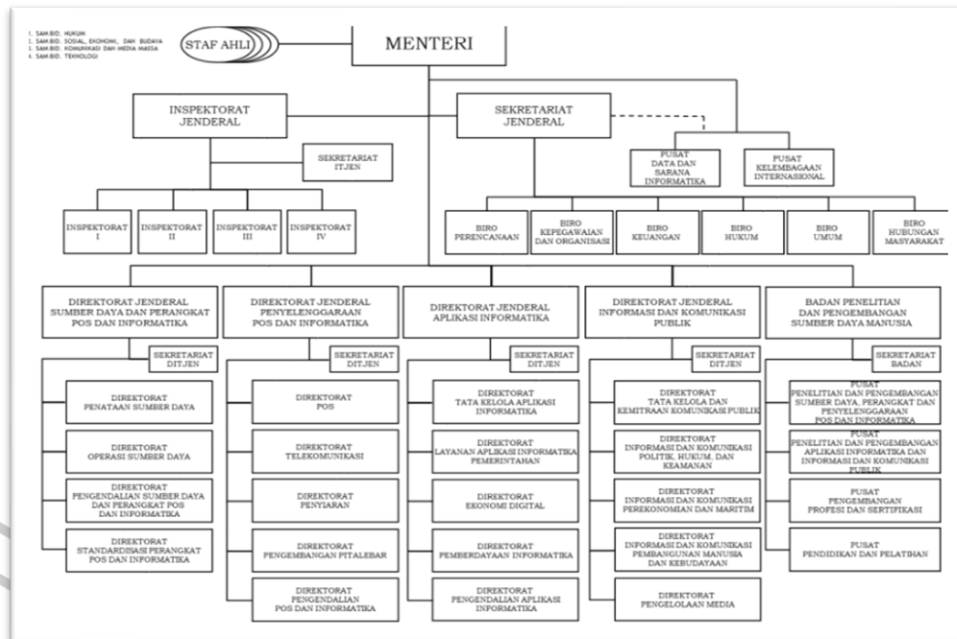
Visi:

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Misi:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

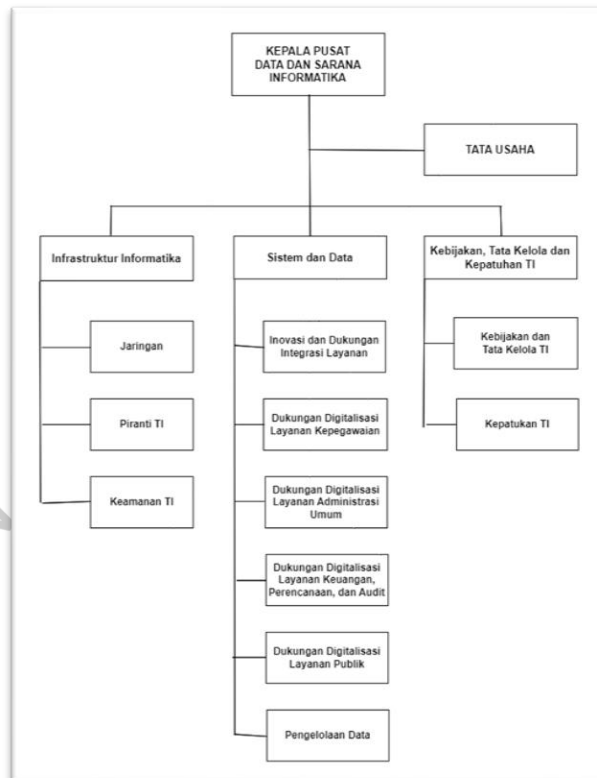
2.2 Struktur Organisasi



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kominfo

(Sumber: Kominfo.go.id)

Kementerian Kominfo memiliki struktur organisasi yang terdiri dari banyak unit organisasi. Susunan organisasi Kominfo meliputi Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selain itu, Kominfo memiliki sejumlah unit organisasi lainnya, seperti Pusat Data dan Sarana Informatika dan Pusat Kelembagaan Internasional. Setiap unit organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab khusus untuk mengurus komunikasi dan informatika. Dengan struktur organisasi yang jelas sesuai dengan Gambar 2.2 diharapkan pengelolaan komunikasi dan informatika di Indonesia dapat berjalan secara tepat.



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Pusat Data dan Sarana Informatika

Pada gambar 2.3 terdapat struktur Kepala Pusat Data dan Sarana Informatika di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kepala Pusat dan Sarana Informatika dimulai dari Kepala Pusat Data dan Sarana Informatika sebagai pimpinan yang bertanggung jawab pada divisi yang di bawahnya, seperti Infrastruktur Informatika, Sistem dan Data, dan Kebijakan, Tata Kelola dan Kepatuhan TI.

Pada divisi Infrastruktur Informatika sebagai pemimpin yang bertanggung jawab pada satuan kerja yang di bawahnya, seperti Jaringan, Piranti TI dan Keamanan TI. Berikutnya Divisi Sistem dan Data merupakan pemimpin untuk satuan kerja sebagai berikut, Inovasi dan Dukungan Integrasi Layanan, Dukungan Digitalisasi Layanan Kepegawaian, Dukungan Digitalisasi Layanan Administrasi Umum, Dukungan Digitalisasi Layanan Keuangan, Perencanaan, dan Audit, Dukungan Digitalisasi Layanan Publik, dan Pengelolaan Data. Terakhir pimpinan divisi Kebijakan, Tata Kelola dan Kepatuhan TI yang bertanggung jawab pada satuan kerja Kebijakan dan Tata Kelola TI dan Kepatuhan TI.

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan

Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan pemerintahan di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan dari Presiden. Selanjutnya Kementerian Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat dan membangun masyarakat informasi di Indonesia.

Kominfo akan memimpin implementasi UU KIP dan memastikan sosialisasinya melalui Komite Informasi. Kemampuan informasi dirancang tidak hanya untuk memberikan informasi, tetapi untuk memberikan nilai tambah ekonomi, serta mendukung komunikasi yang lebih strategis untuk membangun integrasi nasional yang baik. Untuk menjalankan fungsinya, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan nasional dan internasional. Kominfo juga mengelola pembiayaan kewajiban layanan universal serta penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan teknologi informasi.

Dampak positif UU KIP adalah mempercepat terwujudnya pengelolaan informasi yang berkualitas, pelayanan informasi yang sederhana dan responsive, transparansi, efisiensi dan akuntabel, serta tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Adanya UU KIP berarti pemerintah akan terus memberikan informasi yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan informasi yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi komunitas intelijen nasional. Dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan berperan penting dalam pengembangan sektor teknologi informasi dan komunikasi Indonesia serta mendukung pemerintah dalam penyelenggaraan administrasi negara (MEILINDA, 2019).